



**PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR**

(Studi deskriptif pada masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Desa
Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)

***IMPLEMENTATION DISSEMINATION OF NON-CASH FOOD
ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN BANYUANYAR VILLAGE***

*(Descriptive study in Banyuanyar village, Kalibaru sub-district, Banyuwangi
district)*

SKRIPSI

Oleh :

Anisatul Jannah

130910301011

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR**

(Studi deskriptif pada masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Desa
Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)

***IMPLEMENTATION DISSEMINATION OF NON-CASH FOOD
ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN BANYUANYAR VILLAGE***

*(Descriptive study in banyuanyar village, kalibaru sub-district, banyuwangi
district)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memnuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Sosial

Oleh :

Anisatul Jannah

130910301011

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Penulis dengan rasa syukur dan bangga menyelesaikan Skripsi ini untuk di persembahkan kepada :

1. Bapak Mahsun, ibu Siti Rosida dan adek saya Zannuba Arifah tercinta yang telah banyak mendoakan, memberi dukungan dan nasehat serta pengorbanannya selama ini.
2. Kepada keluarga tercinta terutama Nenek Homsatun, Kakek Abdul hamid dan Tante Jazaiyatul Afifah semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Akhmad munif M, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing, terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasinya.
4. Teman-teman (Kos Kalimantan 14), se-Angkatan 2013 FISIP KESEJAHTERAAN SOSIAL dan “Mas” tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih atas doa, nasehat dan dukungannya.
5. Almamaterku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

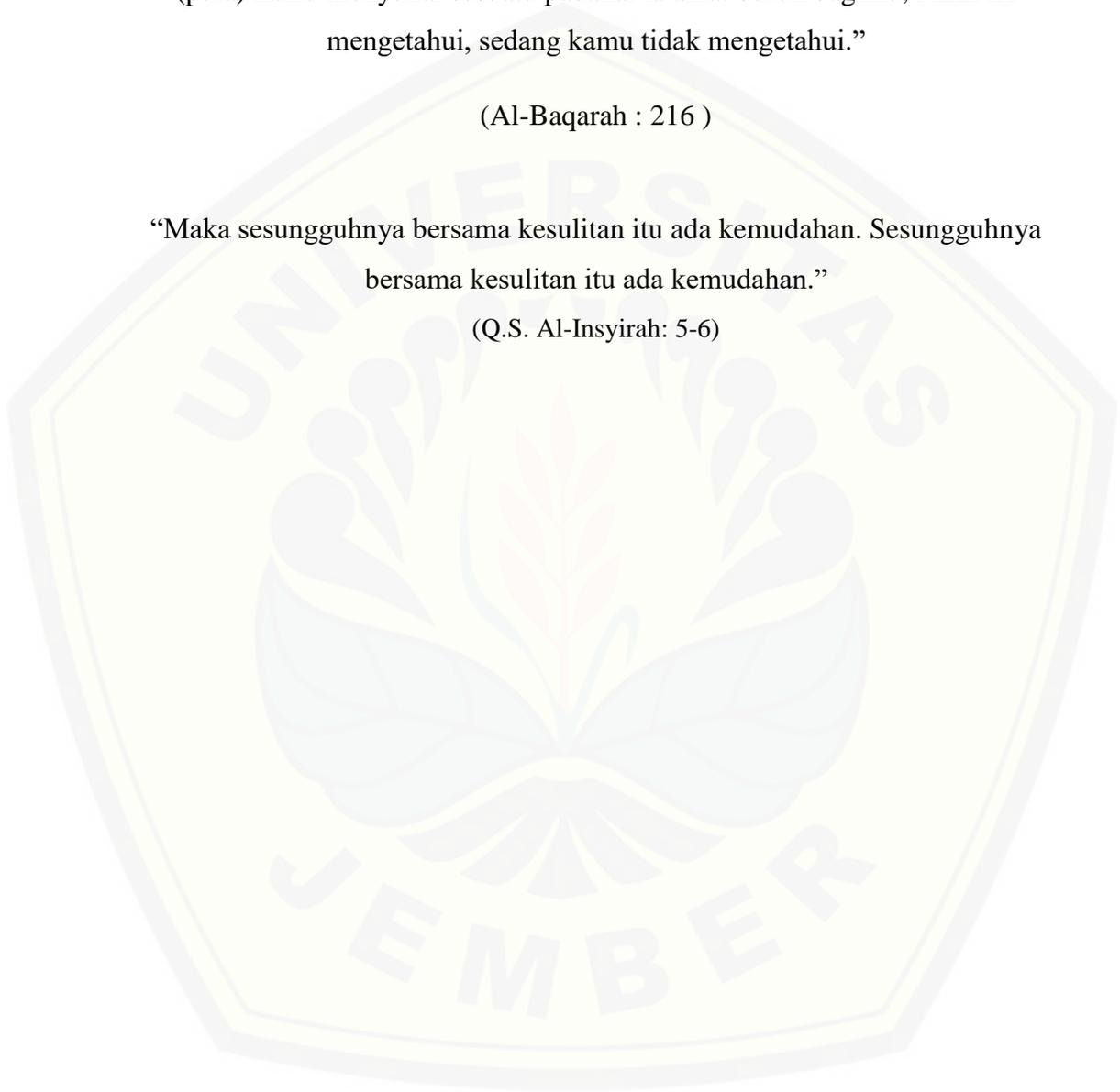
MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, ALLAH mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Al-Baqarah : 216)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisatul Jannah

NIM : 130910301011

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “*Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwangar Studi deskriptif pada masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di desa banyuwangar, kecamatan kalibaru, kabupaten banyuwangi*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 April 2020

Yang menyatakan,

Anisatul Jannah

NIM. 130910301011

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR**

(Studi deskriptif pada masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Desa
Banyuwangi, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)

***IMPLEMENTATION OF DISSEMINATION OF NON-CASH FOOD
ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) IN BANYUANYAR VILLAGE***

*(Descriptive study in banyuwangi village, kalibaru sub-district, banyuwangi
district)*

Oleh :

Anisatul Jannah

130910301011

Pembimbing Utama

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si
NRP. 760014660

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwang (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Banyuwang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi) telah diuji dan disahkan pada :

Hari, Tanggal : 17 Juni 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si
NIP 197001031998021001

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si
NRP 760014660

Anggota I



Dr. Franciscus Adi Prasetyo, M.Si
NIP 197309092008121002

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

“PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR (Studi deskriptif pada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)”.

Anisatul Jannah: 130910301011: 2020: 56 halaman: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk didalamnya kebutuhan ekonomi, ketidakmampuan sebagai alasan dasar penyebab terjadinya kemiskinan ditengarai salah satunya karena sedikit dari masyarakat miskin yang mampu mengenyam pendidikan tinggi sehingga sebagai dampaknya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki tidak mampu menjadi jawaban atas tantangan dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Tentu kondisi tersebut memacu pemerintah untuk terus mampu menanggulangnya, termasuk beberapa desain program telah dicanangkan dan diimplementasikan, namun tentunya menanggulangi kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, sekalipun upaya sudah banyak dilakukan dan ada tren penurunan secara statistik namun keberadaannya masih masih cukup signifikan dan menuntut upaya-upaya yang lebih optimal untuk menanggulangnya, terbukti diberbagai daerah di Indonesia, kemiskinan masih dipahami sebagai masalah sosial yang terus diupayakan penyelesaiannya.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang secara mekanisme disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan

di tempat yang telah bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Adapun program tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program ini mendapat sambutan dan dukungan yang sangat positif dari presiden. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan, dan untuk mendukung program BPNT maka Presiden juga telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif, dengan jenis penelitian study kasus karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan diseminasi program bantuan pangan non tunai di Desa Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan alur atau pedoman yang sudah ditetapkan oleh kementerian dan pemerintah. Untuk penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi yang dilanjutkan dengan wawancara, di iringi dengan proses dokumentasi.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu yang menjadi indikator dari kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga banyak berpengaruh pada produktifitas seseorang atau kelompok dalam meningkatkan derajat kesejahteraan. Dalam analogi sederhana dapat dikatakan jika seseorang atau kelompok yang berpendidikan rendah maka produktivitasnya juga akan rendah dan rendah produktivitas tersebut nantinya juga akan menyebabkan rendahnya pendapatan mereka.

Tingkat ekonomi masyarakat merupakan salah satu gambaran kesejahteraan penduduk disuatu tempat, sekalipun hal tersebut bukan tolak ukur yang mutlak setidaknya hal tersebut sebagai gambaran sederhana atas kondisi perekonomian masyarakat, di Desa Banyuanyar secara umum penduduknya merupakan buruh tani dengan besaran jumlah mencapai 1.355 orang dari total 2.561 orang penduduk yang bekerja. Dapat dikatakan bahwa penduduk desa banyuanyar secara umum merupakan penduduk yang masih belum mampu, mengingat tingkat pendapatan buruh tani dari beberapa jenis pekerjaan yang ada terbilang paling rendah. Artinya jika program BPNT dilaksanakan di Desa Banyuanyar cukup tepat karena jika merujuk kepada data yang telah di uraikan di atas, banyak masyarakat yang memang membutuhkannya.

Kata Kunci : Pelaksanaan Diseminasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai

PRAKATA

Puji syukur selalu dipanjatkan karena kehadiran Allah Yang Maha Esa yang penuh dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tanpa kendala.

Penelitian ini diambil atau diteliti karena adanya permasalahan dengan kualitas antar salon yang bersaing. Tema penelitian kali ini berjudul, “*Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwanyar*”.

Ucapan terimakasih selalu terhaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada semua pihak yang terkait yang sudah banyak mendukung dan membantu baik berupa gagasan, ide, pemikiran dan tenaga.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Bapak Akhmad Munif M, S.sos, M.si selaku Dosen Pembimbing dalam Karya tulis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan mendidik penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Staff Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
6. Kepada Ketua Bumdesa Amanah Banyuwanyar serta anggota tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Teman-teman jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2013 yang selalu memberikan support selama perkuliahan.

Jember, 16 April 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Diseminasi	8
2.1.1 Pengertian Diseminasi	8
2.1.2 Langkah Strategi Dalam Diseminasi	10
2.1.3 Efektifitas Diseminasi	11
2.2 Pelayanan Sosial	12
2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial	12

2.2.2 Fungsi Pelayan Sosial.....	15
2.2.3 Dasar-Dasar Pelayan Sosial	17
2.3 Pelaksanaan Program Pelayan Sosial.....	18
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.5 Konsep Kebijakan	26
2.6 Konsep Kebijakan Soisal	27
2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	30
2.8 Kerangka Berfikir	31
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Pendekatan Penelitian	35
3.3 Metode Penentuan Lokasi.....	35
3.4 Teknik Penentuan Informan	37
3.4.1 Informan Pokok (<i>primary informan</i>)	38
3.4.2 Informan Tambahan (<i>secondary informan</i>)	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5.1 Observasi	39
3.5.2 Wawancara	40
3.5.3 Dokumentasi	41
3.6 Teknik Analisa Data	42
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	44
BAB 4. HASIL TEMUAN LAPANGAN.....	46
4.1 ANALISA	52
BAB 5 PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55

5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

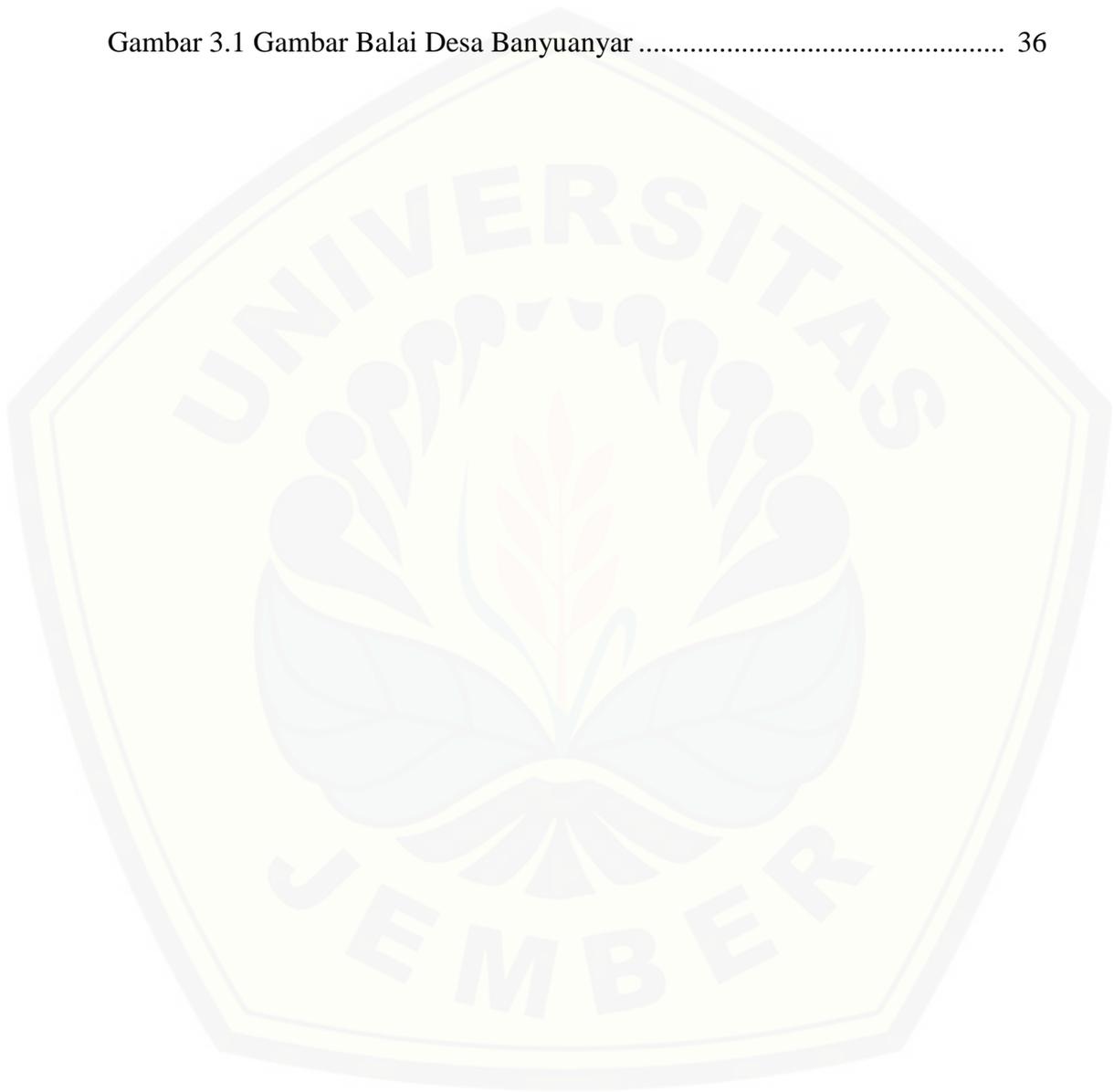
Halaman

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin desa banyuanyar 2018.... 37



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 2.1 Alur berpikir konsep penelitian	33
Gambar 3.1 Gambar Balai Desa Banyuwangi	36



DAFTAR LAMPIRAN

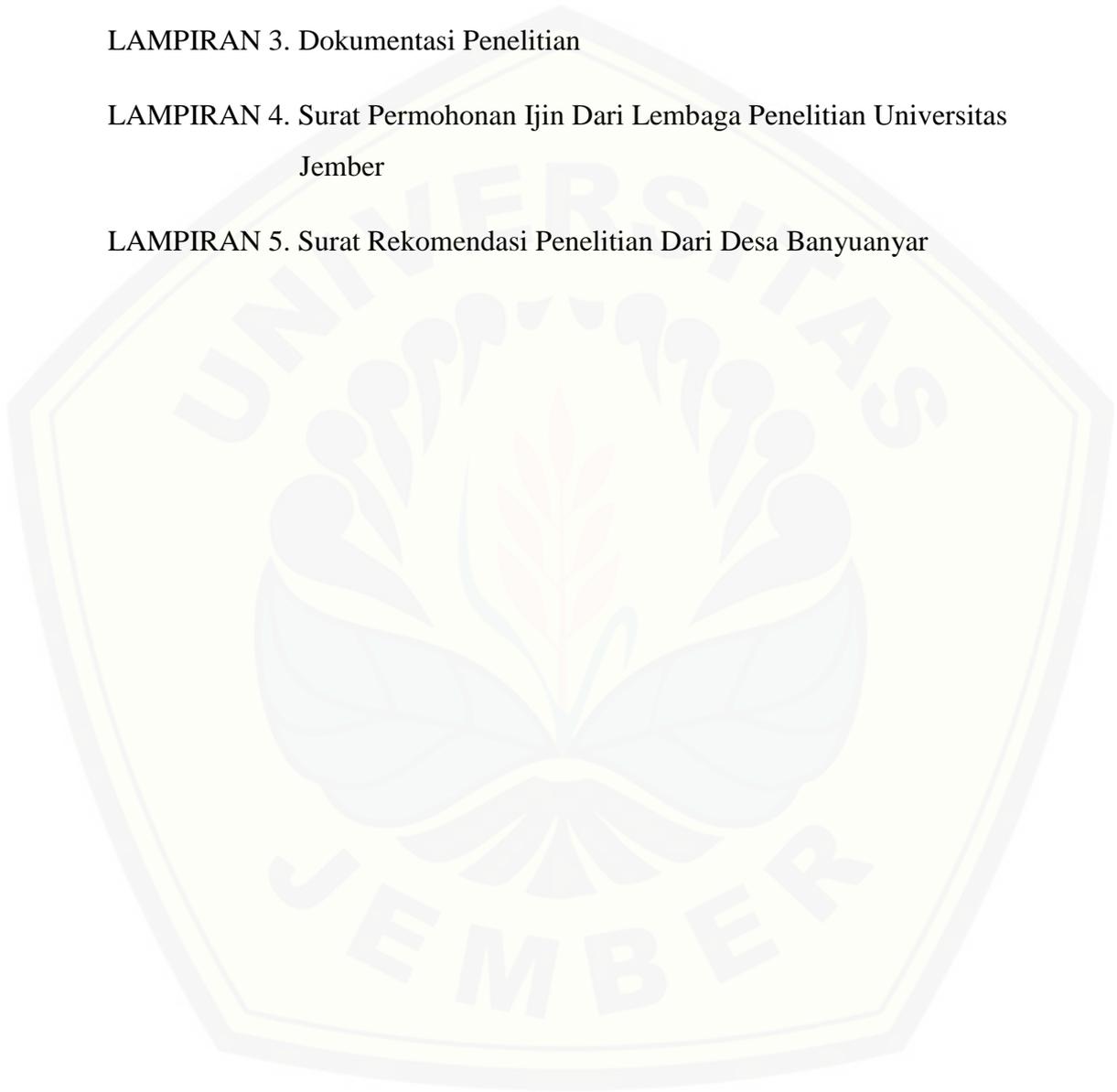
LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara

LAMPIRAN 2. Hasil Wawancara

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Penelitian

LAMPIRAN 4. Surat Permohonan Ijin Dari Lembaga Penelitian Universitas
Jember

LAMPIRAN 5. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Desa Banyuanyar



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk didalamnya kebutuhan ekonomi, ketidakmampuan sebagai alasan dasar penyebab terjadinya kemiskinan ditengarai salah satunya karena sedikit dari masyarakat miskin yang mampu mengenyam pendidikan tinggi sehingga sebagai dampaknya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki tidak mampu menjadi jawaban atas tantangan dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Tentu kondisi tersebut memacu pemerintah untuk terus mampu menanggulangnya, termasuk beberapa desain program telah dicanangkan dan diimplementasikan, namun tentunya menanggulangi kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan, sekalipun upaya sudah banyak dilakukan dan ada tren penurunan secara statistik namun keberadaannya masih cukup signifikan dan menuntut upaya-upaya yang lebih optimal untuk menanggulangnya, terbukti diberbagai daerah di Indonesia, kemiskinan masih dipahami sebagai masalah sosial yang terus diupayakan penyelesaiannya.

Merespon kondisi tersebut, tentunya peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan, dan tepat pada tahun 2010 untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, ditingkat provinsi dan kabupaten / kota, dibentuk Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang masih menjadi problem mendasar bagi masyarakat Indonesia di banyak daerah.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang secara mekanisme disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan pihak perbankan yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Adapun program tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos), yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program ini mendapat sambutan dan dukungan yang sangat positif dari presiden. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan, dan untuk mendukung program BPNT maka Presiden juga telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pada awalnya, program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak

terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, *Inclusion Error sebaliknya*, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan. (cpps.ugm.ac.id, 2018)

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2018, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu. Program BPNT, pertama kali diterapkan pada awal tahun 2018 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun, dan untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Mentari. E-Warung Mentari adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh E-Warung sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota E-Warung Mentari. E-Warung merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan

secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program BPNT. Selanjutnya, untuk mendukung pengelolaan E-Warong, maka Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Banyuwangi telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri serta Badan Usaha Logistik (Bulog)/Koperasi. (www.m.antaranews.com, 2018).

Sebagai salah satu daerah yang juga memiliki kantong-kantong kemiskinan maka kabupaten banyuwangi juga ditunjuk untuk menerapkan program BPNT ini, dimana hal ini juga sebagai pilihan program yang dirasa akan jauh lebih memberi dampak yang positif, karena jauh lebih efektif dan efisien dalam penyaluran program bantuan pangan di Kabupaten Banyuwangi, yang seringkali mengeluhkan banyak terjadi ketidak tepatan sasaran, terjadinya pungutan diluar ketentuan, dll, yang tentu merugikan masyarakat miskin. Seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat Desa Banyuanyar yang tidak berkenan disebutkan namanya, saat ditemui di kediamannya menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tuai (BPNT), menghindarkan beberapa masalah penyaluran bantuan pangan pada masyarakat, karena dengan model yang demikian hanya masyarakat yang berhak yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik, dengan kartu tersebut diakuinya mampu memutus rentetan panjang proses yang kadang menjadi peluang penyelewengan bantuan. Dari pernyataan tersebut diatas, mengindikasikan bahwa program Bantuan Pangan Non Tuai (BPNT) ini mampu dipahami positif dan disambut baik sebagai upaya efektif dalam mengoptimalisasi layanan pada masyarakat miskin, dengan demikian program ini memungkinkan akan mampu memiliki daya dukung yang baik untuk terimplementasi. Namun yang menjadi catatan sekalipun upaya sudah banyak dilakukan dan ada tren penurunan secara statistik namun tuntutan pada upaya-upaya yang lebih optimal masih sangat dibutuhkan mengingat kemiskinan masih dipahami sebagai masalah sosial yang terus diupayakan penyelesaiannya, dan salah satu kota yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yaitu Kota Banyuwangi.

Menurut rilis dari Badan Pusat Statistik 2018, tercatat bahwa tingkat kemiskinan di Daerah Banyuwangi pada bulan Maret tahun 2018 yaitu sebesar 13,02 persen. Kemudian, apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada bulan September tahun 2016, sebesar 13,10 persen. Hal ini, berarti dalam jangka waktu setengah tahun telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,08 persen. Sedangkan untuk jumlah kemiskinan pada bulan Maret tahun 2016, persentase penduduk miskin yaitu sebesar 13,34 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,32 poin. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, tingkat kemiskinan di Daerah Banyuwangi telah mengalami penurunan dari 2 bulan dalam jangka waktu 1 tahun antara tahun 2016 hingga tahun 2018. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut, salah satunya dipengaruhi dari program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat, dan oleh karenanya Penyelenggaraan dan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai salah satu program yang ditengarai mampu memberi dampak pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi masih terus dioptimalkan.

Tercatat menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kabupaten Banyuwangi menasar 101.626 warga, dimana sejumlah tersebut merupakan warga yang dapat dipastikan telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang merupakan bagian syarat bagi warga untuk mengambil BNPT disetiap bulannya. Sejalan dengan hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Peni Handayani mengatakan, dari jumlah total 101.626 masyarakat Banyuwangi yang mendapatkan BNPT, terbagi menjadi 63.371 penerima BNPT sedangkan sisanya yakni mencapai 38.255 merupakan keluarga miskin penerima program keluarga harapan (PKH). "Rinciannya 63.371 merupakan warga yang dulunya menerima beras sejahtera (Rastra), sedangkan sisanya 38.255 dari PKH, dan mereka akan menerima bantuan mencapai Rp. 110.000 perbulan, yang diwujudkan dengan beras dan telur. Khusus di Banyuwangi, penyaluran BPNT ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes), yang sudah menjadi agen dalam penyaluran bahan pangan yang telah ditunjuk.

Pelibatan BumDes merupakan upaya dari pemerintah Banyuwangi dalam hal ini dinas sosial agar penyaluran bantuan mampu berjalan secara partisipatif sehingga penyelenggaraanya dapat dilaksanakan dan dikontrol langsung oleh masyarakat, sehingga mampu meminimalisasi ruang dan peluang penyelewengan. Namun berbicara pelaksanaan yang menjadi titik perhatian dalam optimalisasi program masih banyak terdapat beberapa komponen lain yang juga berpengaruh dalam pelaksanaan program, salah satunya diantaranya jika merujuk pada pernyataan (Richard M, Titmuss) yang menjelaskan bahwa fungsi pelayanan sosial diantaranya keuntungan-keuntungan yang diciptakan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, melainkan juga harus mampu lebih meningkatkan kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Artinya mengukur efektivitas program BPNT tidak hanya meliputi Tepat Sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi saja melainkan juga harus mampu menjadikan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai upaya yang mampu memberdayakan dan mampu mendorong terbangunnya memandirikan masyarakat, dalam hal ini proses sosialisasi dan edukasi menjadi komponen pokok diantara beberapa komponen lain, karena dengan tidak terbangunnya proses sosialisasi dan edukasi yang baik pada masyarakat, tentunya akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat pada program, sehingga nantinya akan berpengaruh pada optimalnya masyarakat dalam mengakses program tersebut, dan yang tidak kalah penting harapan kemandirian pada masyarakat tentu akan sulit untuk dapat diraih. Mengingat sumberdaya finansial yang dimiliki pemerintah khususnya pemerintah tentunya terbatas dan tidak memungkinkan program ini untuk terus dilakukan, sehingga perlu memperhatikan bahwa dalam kurun waktu tertentu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah harus diakhiri karena telah terbangun kemandirian pada masyarakat. Berdasar pada pemahaman tersebut maka bagi penulis tertarik meneliti dan menelaah lebih jauh pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya pada **Pelaksanaan Diseminasi Pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Banyuanyar.**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian agar hasil memiliki arti yang mampu bernilai ilmiah, peneliti harus mematuhi prosedur-prosedur penelitian. Salah satunya dengan membuat rumusan masalah dari latar belakang yang sudah diurai dengan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tahap selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan “ **Bagaimana Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Banyuwangi?** ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menjadi kunci dalam penelitian untuk menjawab apa yang akan dicapai oleh peneliti yang akan dilakukan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Diseminasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Banyuwangi”

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan edukasi yang efektif dan efisien pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Memberikan informasi dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan informasi pada pembaca tentang Proses Sosialisasi dan edukasi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Banyuwangi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah laporan proposal atau hasil penelitian, karena pada bab ini diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti.

2.1 Diseminasi

2.1.1 Pengertian Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah akan terjadi pada aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan), perubahan tersebut menuju ke arah yang sesuai dengan konsep dan cara yang benar atau seharusnya. Diseminasi juga bisa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang di rencanakan, diarahkan dan dikelola sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan diseminasi merupakan penyebaran inovasi yang di susun dan disebar dengan metode perencanaan yang matang serta pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Bidang diseminasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi. Bidang Diseminasi Informasi sendiri membawahi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

a. Seksi Layanan Informasi Publik; mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik

2. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi
3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan publik
4. menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang layanan publik
5. menyiapkan bahan pelaksanaan iklan layanan masyarakat
6. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi.

b. Seksi Media Interaktif; mempunyai tugas :

1. menyiapkan bahan pelaksanaan dan konsep kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (*interpersonal communication*)
2. menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan
3. menyiapkan bahan untuk dialog publik
4. menyusun bahan fasilitasi komunikasi publik
5. mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi.

c. Seksi Media Informasi mempunyai tugas :

1. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media elektronik, cetak dan luar ruang
2. menyiapkan dan menyusun bahan diseminasi informasi melalui media radio dan televisi
3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan radio milik pemerintah daerah
4. menyiapkan bahan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya
5. menyiapkan bahan penyertaan pameran/promosi

6. menyiapkan bahan pelaksanaan produksi media luar ruang seperti billboard, mobile billboard, LED, baliho, maupun umbul-umbul
7. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan news room

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi.

2.1.2 Langkah Strategi Dalam Proses Diseminasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dan pengaruh dinamika sosial politik akan berdampak pada pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas instansi/lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Secara umum pola penyebaran informasi dimasa mendatang relatif tidak berubah. Diseminasi melalui komunikasi satu arah masih banyak digunakan. Namun, proses penyebaran informasi melalui pendekatan komunikasi transaksional yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, dan resiprokal akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan.

Dalam konteks strategi proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi tetap harus menciptakan kepentingan bersama (*common interest*), yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat 'bertemu'. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi :

1. Menentukan dan memahami tujuan.
2. Mengidentifikasi pesan inti atau kunci (*key messages*) yang akan dikomunikasikan.
3. Memahami target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsern atau minat mereka?
4. Menentukan media yang paling efektif.
5. Memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan.
6. Frekuensi penyampaian pesan.
7. Memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif.

Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah evaluasi, sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain itu, program diseminasi perlu adanya analisa apakah semua strategi dalam penyampain informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

2.1.3 Efektivitas Diseminasi

Menurut Moeliono dalam kamus Bahasa Indonesia (1990:950), efektivitas adalah Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur, atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan). Berdasarkan penjabaran di atas, maka efektivitas adalah Adanya efek yang nantinya menimbulkan suatu pengaruh terhadap apa disampaikan kepada seseorang yang nantinya menghasilkan suatu tindakan. Sedangkan Ruslan (2004:53) menyatakan suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi tersebut memiliki persamaan persepsi antara komunikator dengan komunikannya. Lebih lanjut Ruslan mengatakan (2004:57), ada lima hal yang dapat yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu :

1. Pemahaman

Pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dalam hal ini komunikator dapat dikatakan efektif jika penerima memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya.

2. Kesenangan

Komunikasi ini bertujuan untuk menimbulkan kesejahteraan bersama.

3. Mempengaruhi Sikap

Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai situasi kita berusaha mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain memahami ucapan kita.

4. Memperbaiki Hubungan

Memilih dan mempersiapkan kata-kata yang ingin diucapkan merupakan faktor penting yang dapat memungkinkan komunikasi terjadi dengan tepat dan sempurna. Kegagalan utama dalam berkomunikasi muncul bila isi pesan tidak dipahami secara cermat.

5. Tindakan

Komunikasi apapun tidak akan berguna bila tidak memberi hasil sesuai dengan yang diinginkan. Namun, mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan, merupakan hasil yang paling sulit dicapai dalam berkomunikasi. Bila kita mencoba membangkitkan tindakan pada penerima pesan, kemungkinan responnya yang sesuai dengan yang diinginkan lebih besar jika dapat memudahkan pemahaman penerima pesan tentang apa yang diharapkan, meyakinkan penerima bahwa tujuan itu masuk akal dan mempertahankan hubungan harmonis dengan penerima.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi akan efektif jika pesan yang disampaikan melalui media dibuat dengan cermat dan baik sehingga nantinya dari pesan tersebut di terima dengan baik oleh komunikan.

2.2 Pelayanan Sosial

2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial. Menurut Walter Friedlander, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha–usaha sosial dan lembaga–lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh, serta mempertinggi kesejahteraan selaras dengan kebutuhan–kebutuhan keluarga dan masyarakat (Wibhawa dkk, 2010 : 24).

Dari defenisi di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “organized system” yang berintikan lembaga – lembaga dan pelayanan sosial.
2. Tujuan sistem tersebut adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti singkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan, dan juga relasi – relasi sosial dengan lingkungannya.
3. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan “kemampuan individu” baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 : “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila” (Muhidin, 1992: 5).

Lingkup pengertian kesejahteraan sosial yang sebenarnya sangat meluas dan melingkupi berbagai aspek kehidupan. Dalam kesejahteraan sosial juga terdapat usaha kesejahteraan sosial, dimana pelayanan sosial juga termasuk dari salah satu di dalamnya. Pelayanan sosial diartikan dalam dua macam, yaitu:

- a) Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya.

- b) Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya (Muhidin, 1992: 41).

Dalam kegiatannya terdapat beberapa tahapan dalam pelayanan sosial yaitu :

1. Tahap pendekatan awal (engagement, intake, contact, and contract), adalah suatu proses kegiatan penjajagan awal, konsultasi dengan pihak terkait; sosialisasi program pelayanan, identifikasi calon penerima pelayanan, pemberian motivasi, seleksi, perumusan kesepakatan, dan penempatan calon penerima pelayanan; serta identifikasi sarana dan prasarana pelayanan.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment), adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan.
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah (planning), adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah, serta penetapan berbagai sumber daya (manusia, biaya, metode-teknik, peralatan, sarana-prasarana, dan waktu) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Pelaksanaan pemecahan masalah (intervention), adalah suatu proses penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kegiatan pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi, dan advokasi.
5. Evaluasi, terminasi dan rujukan, evaluasi pemecahan masalah adalah suatu proses kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemecahan masalah dan atau indikator-indikator keberhasilan pemecahan masalah terminasi adalah suatu proses kegiatan pemutusan hubungan pelayanan/pertolongan antara lembaga dengan penerima

pelayanan rujukan merupakan suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (<http://dokumen.tips/documents/buku-sakupekerja-sosialdocx.html>).

2.2.2 Fungsi–Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan klasifikasi. Perserikatan bangsa bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut :

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi.
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Richard M, titmuss mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari perspektif masyarakat sebagai berikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkat kesejahteraan individu kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan sosial (suatu program tenaga kerja).
3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
4. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang orang yang tidak mendapat

pelayanan sosial (misalnya kompensasi kecelakaan industri dan sebagainya).

Alfred J. Khan menyatakan bahwa fungsi utama pelayanan sosial adalah :

1. Pelayanan sosial untuk sosialisasi dan pengembangan, dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri anak dan pemuda melalui program-program pemeliharaan, pendidikan (non formal) dan pengembangan. Tujuannya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai masyarakat dalam usaha pengembangan kepribadian anak. Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain :
 - a) Program penitipan anak.
 - b) Program-program kegiatan remaja atau pemuda.
 - c) Program-program pengisian waktu terluang bagi anak dan remaja dalam keluarga.
2. Pelayanan sosial untuk penyembuhan, perlindungan dan rehabilitasi, mempunyai tujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang baik secara individu maupun didalam kelompok atau keluarga dan masyarakat agar mampu mengatasi masalah-masalahnya. Bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut antara lain :
 - a) Bimbingan sosial bagi keluarga.
 - b) Program asuhan keluarga dan adopsi anak.
 - c) Program bimbingan bagi anak nakal dan bebas hukuman.
 - d) Program-program rehabilitasi bagi penderita cacat.
 - e) Program-program bagi lanjut usia.
 - f) Program-program penyembuhan bagi penderita gangguan mental.
 - g) Program-program bimbingan bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam bidang pendidikan.
 - h) Program-program bimbingan bagi para pasien dirumah-rumah sakit.
3. Pelayanan akses, kebutuhan akan program pelayanan sosial akses disebabkan oleh karena :

- a) Adanya birokrasi modern.
- b) Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hal hal dan kewajiban atau tanggung jawabnya.
- c) Jarak geografis antara lembaga-lembaga pelayanan dari orang-orang yang memerlukan pelayanan sosial.

Dengan adanya berbagai kesenjangan tersebut, maka pelayanan sosial disini mempunyai fungsi sebagai akses untuk menciptakan hubungan bimbingan yang sehat antara berbagai program sehingga Program-program tersebut dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pelayanan akses bukanlah semata-mata memberikan informasi tetapi juga termasuk menghubungkan seseorang dengan sumber-sumber yang diperlukan dengan melaksanakan Program-program referral.

Fungsi tambahan dari pelayanan sosial ialah menciptakan partisipasi anggota masyarakat untuk mengatasi masalah sosial. Tujuan dapat berupa : individual dan sosial untuk memberikan kepercayaan kepada diri individu dan masyarakat dan untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial dalam pembagian politis, yaitu untuk mendistribusikan sumber-sumber dan kekuasaan.

2.2.3 Dasar-Dasar Pelayanan Sosial

Partisipasi mungkin merupakan konsekwensi dari bagaimana program itu diorganisir, dilaksanakan dan disusun. Ada yang memandang partisipasi dan pelayanan merupakan dua fungsi yang selalu konflik karenanya harus dipilih salah satu. Karena harus dipilih partisipasi sebagai tanggung jawab masyarakat dan pelayanan sebagai tanggung jawab program. Pada umumnya sulit untuk meningkatkan kedua-duanya secara sekaligus. (<http://kodarsocialwelfare.blogspot.co.id/2011/12/pelayanan-sosial.html>).

Dalam Undang –undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Panti Sosial atau lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki posisi strategis, karena memiliki tugas dan tanggung jawab mencakup 4 kategori, yaitu :

1. Bertugas dalam mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin.
2. Bertugas melakukan rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri, dan tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya, dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian di masyarakat.
3. Memberikan pelayanan pemakanan sesuai dengan standar gaji pembinaan fisik, agama, psikologis, sosial dan pendidikan disekolah bagi anak sekolah usia sekolah, agar mampu berperan aktif di lingkungan masyarakat.
4. Bertugas untuk mengembalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ke masyarakat melalui penyiapan sosial, penyiapan masyarakat agar mengerti dan menerima kehadiran kembali dan membantu penyaluran ke berbagai sektor kerja dan usaha produktif.
5. Melakukan pengembangan individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf hidup kesejahteraan pribadi, meningkatkan rasa tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi aktif ditengah masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan dan memfasilitasi dukungan psiko-sosial dari keluarga.

2.3 Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial

Konsep pelayanan berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok dan masyarakat. Ini sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah

baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya. Pada umumnya masyarakat awam belum begitu tahu dengan apa yang di maksud dengan pelayanan sosial itu sendiri dan siapa saja yang terlibat dalam melakukan pelayanan sosial itu. Hal tersebut disebabkan karena mereka hanya mengetahui pelayanan yang bersifat menolong “sesaat” atau dengan kata lain hanya mengenal pelayanan itu dalam bentuk bantuan langsung. Luasnya konsepsi mengenai pelayanan-pelayanan sosial sebagaimana dikemukakan (Romanyshyn, 1971) Bahwa pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga, melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektifitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi serta masyarakat.

E-warong adalah program pelayanan publik dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dahulunya berupa bantuan uang tunai menjadi bantuan non-tunai. Program e-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan dana bantuan sosial. Salah satu, bantuan sosial yang dapat dicairkan di e-Warong yaitu program BPNT. Program BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non-tunai melalui mekanisme akun elektronik, yang disalurkan oleh pemerintah kepada peserta KPM dan hanya dapat dicairkan dalam bentuk pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himbara. Masing-masing peserta KPM akan mendapat kartu KKS elektronik sesuai dengan data-data nama peserta yang telah ditetapkan.

Pemerintah dapat menyalurkan dana bantuan sosial program BPNT melalui Kartu KKS sebesar Rp. 110.000, per-bulan. Untuk mengoptimalkan program BPNT, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung (E-Warong). Selain itu, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan ini dibuat, agar seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, dapat disalurkan secara non

tunai. Uang non-tunai memberikan kemudahan bagi konsumen, karena tidak memerlukan uang cash dan dapat menghemat waktu, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan efisien. Pada saat ini, telah banyak penelitian terkait uang elektronik/non-tunai yang berjalan di Indonesia seperti: Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2018); Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. (2018); Abidin, M. S., & Anwar, M. K. (2015); Ramdani, D. D., Gandana, R. S., Setyamarta, N., & Aulina, L. (2015). Salah satu penelitian mengenai Elektronik /non-tunai ditulis oleh Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2018) dalam Jurnal Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di Indonesia. Dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan penilaian terkait implementasi E-money/uang elektronik dari tahun 2012 hingga tahun 2014.

Pengukuran dari hasil implementasi uang elektronik tersebut dilakukan menggunakan metode wawancara dan survei, yang kemudian mendapat kesimpulan yaitu infrastruktur yang memadai, tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap uang elektronik X sudah berjalan dengan baik. Namun, preferensi pengguna untuk memilih produk uang elektronik X, dibandingkan produk uang elektronik lainnya masih cukup baik. Dalam jurnal ini, peneliti juga menjelaskan, faktor penghambat yang dihadapi nasabah uang elektronik X yaitu : keterbatasan merchant, keterbatasan metode akses, keterbatasan channel transaksi, biaya transaksi, kompetitor produk sejenis, serta pengaruh faktor sosial budaya.

Kemudian, penelitian lain yang juga menjadi rujukan dalam penelitian mengenai uang elektronik/non-tunai yaitu ditulis oleh Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. (2018), dalam Jurnal Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan masyarakat, manfaat dan hambatan penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel populasi. Teknik pengambilan data primer yang digunakan antara lain kuesioner, Forum Group Discussion, Observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi pesentase. Berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa seluruh masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting sudah dapat dinyatakan siap untuk menggunakan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dan diharapkan program tersebut dapat diimplementasikan segera. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah efektifitas dan efisiensi dari segi biaya transportasi, jarak tempuh lebih dekat, notifikasi penyaluran dana dapat lebih cepat, uang dapat diambil sewaktu-waktu, kemudahan transfer, serta menjadi jembatan awal masyarakat untuk masuk ke dalam sektor keuangan dengan kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal yang menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan keuangan seperti tabungan dan kredit. Kendala penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah masih ada masyarakat yang belum memiliki handphone dan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai uang elektronik. Selanjutnya, penelitian lain yang berkaitan dengan uang elektronik yang lebih mengarah kepada good governance yaitu: Abidin, M. S., & Anwar, M. K. (2015) dalam Jurnal Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai uang elektronik/e-money yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur sektor moneter dan regulasi tentang sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini juga menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan diterapkannya E-money adalah sebagai berikut :

Pertama, Dampak E-money Terhadap Penerbit (Issuer) yaitu memberikan keuntungan bagi bank atau lembaga penerbit, karena penggunaan uang elektronik sangat mudah digunakan, praktis dan mempercepat proses transaksi, sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik tersebut. Kedua, Dampak E-money Terhadap Pengusaha (Merchant) yaitu mampu meningkatkan profit bagi pengusaha yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha serta meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam setiap proses transaksi, proses transaksi cepat, dan terjaga kemanannya. Ketiga, Dampak E-money Terhadap Pengguna Kartu E-money (Customer) yaitu

memberikan kemudahan dalam setiap proses transaksi, karena dengan adanya E-money pengguna tidak perlu membawa uang tunai/cash dan terhindar dari kesalahan dalam proses transaksi. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka dapat mendorong kenaikan tingkat konsumsi. Berbanding terbalik dengan beberapa jurnal/disertasi diatas, terdapat salah satu penelitian yang menjelaskan mengenai strategi dalam penerapan uang elektronik/E-money yaitu : Ramdani, D. D., Gandana, R. S., Setyamarta, N., & Aulina, L. (2015) dalam Jurnal Triple C (Centralize And Comprehensive Concept) Sebagai Usaha Strategis Penerapan E-Money Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rujukan dari beberapa sumber antara lain : Wawancara, pengamatan secara langsung dan studi dari berbagai literatur. Selanjutnya, informasi dan data-data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang ada, sedangkan sumber primer dilakukan dengan wawancara kepada salah satu bank pemerintah dan swasta.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan E-money dengan menggunakan Teori Triple C (Centralized and Comprehensive Concept) sebagai rencana strategis dalam penerapan E-money di Indonesia. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Triple C yaitu sebagai berikut : Pertama, mewujudkan Centralized Concept; Kedua, mewujudkan Comprehensive Concept; Ketiga, menerapkan kedua konsep dan melakukannya dengan konsisten berkelanjutan; Keempat, dilakukan evaluasi program secara terus menerus/berkala dan peningkatan dan perbaikan dari kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hasil dari diterapkannya metode Triple C adalah mewujudkan uang elektronik/e-money di Indonesia, sekaligus mengintegrasikan seluruh jaringan produk E-money di Indonesia dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan mampu memanfaatkan e-money dengan baik.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan e-Warong sebagai sarana dalam penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Banyuwangi. E-warong merupakan program yang baru dilaksanakan, karena mulai diterapkan pada

pertengahan tahun 2018. Dari tinjauan pustaka diatas, penelitian yang sering diambil yaitu mengenai strategi, dampak, implementasi, upaya, pelaksanaan, hambatan dari uang elektronik/non-tunai. Selanjutnya, penelitian ini juga akan melihat efektivitas pengelolaan E-warong yang nantinya akan diukur menggunakan satu prinsip good governance yaitu, Efektivitas. Kemudian, Indikator efektivitas dalam penelitian ini menggunakan teori menurut (Sutrisno, 2007) yang terdiri dari 5 Indikator yaitu: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Dengan adanya indikator tersebut, maka dapat diukur sejauh mana pengelolaan E-warong yang telah dilaksanakan. Kemudian, dalam penelitian ini juga akan melihat hubungan kerjasama antara pemerintah, bank-bank yang terkait, pihak bulog atau koperasi dan Kube jasa/masyarakat yang mengelola E-warong tersebut, dengan menggunakan 3 pilar good governance yaitu: Negara/Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat. Konsep 3 pilar utama ini, bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan kerjasama antara negara, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan E-Warong tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu, kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih akurat.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Clutterbuck dalam Kadarisman (2014:20), mengemukakan dalam teorinya bahwa: *“Empowerment in terms of encouraging and allowing individuals to take personal responsibility for improving the way they do their jobs and contribute to the organization’s goal”*. Atas pendapat tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan dimaksudkan sebagai suatu pemberian semangat dan mengizinkan individu untuk mengambil tanggungjawab dalam rangka memperbaiki cara yang mereka lakukan dalam pekerjaannya dan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Kartasmita (2009:109) konsep pemberdayaan masyarakat adalah menunjuk pada suatu strategi untuk membangun masyarakat dengan cara

mengoptimalkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada masyarakat sebagai kekuatan utama. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. (Widjaja, 2002:169).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Soeharto (2006:76) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi 2013:24).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001) dalam Zubaedi (2013:24).

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Jim Ife (1995) dalam Zubaedi (2013:75) Sementara itu, World

Bank mengartikan pemberdayaan sebagai perluasan asset dan kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan, mempengaruhi, mengontrol, dan mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (*empowerment is expansion of asset and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions that affect their live* (Zubaedi, 2013:75).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui pengembangan kelembagaan, saran dan prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, Penyuluhan dapat merespons dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset sumber daya fisik dan nonfisik yang diperlukan masyarakat (Vitayala:2000 dalam Zubaedi, 2013:79).

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat. Girvan (2004)

dalam Sugandi (2011:182) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan berdaya apabila memenuhi aspek-aspek berikut:

1. Kebebasan mobilitas, adalah kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.
2. Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’, adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
3. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’, adalah kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.

Ketiga aspek tersebut, merupakan beberapa aspek yang menjadi tolak ukur keberdayaan masyarakat yang setidaknya mampu terpenuhi dengan baik, seperti halnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejatinya ditujukan untuk mengakselerasi terjadinya beberapa aspek di atas pada masyarakat.

2.5 Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum (Suharto. 2011). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

2.6 Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4):

In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs.

Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengempangan (*developmental*). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2005).

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (lihat Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan

barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

3. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata (*intangible aids*). Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial. Setiap negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kebijakan publik dan kebijakan sosial. Di Inggris misalnya, kebijakan mengenai air bersih termasuk pada kebijakan sosial. Di China, kebijakan sosial mencakup pemberian makanan dan pakaian kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan di Belanda, kegiatan-kegiatan kebudayaan (*cultural activities*) merupakan bagian penting dari kebijakan sosial (Spicker, 1995).

Sebagaimana dibahas secara lebih detail dalam buku penulis yang lain, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Suharto, 2006), kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak telantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial.

Dalam makna lain kebijakan social juga diartikan sebagai salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto. 2011). Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak warga negaranya. Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Dimensi kebijakan sosial, yakni:

1. Sebagai suatu proses, kebijakan sosial dipandang sebagai dinamika perumusan kebijakan dalam kaitannya dengan variabel-variabel sosio-politik dan teknik-metodologi. Kebijakan sosial merupakan suatu proses tahapan atau pengembangan rencana tindak plan action.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan sosial dipandang sebagai hasil akhir dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial.
3. Sebagai suatu kinerja atau performance atau pencapaian tujuan, kebijakan sosial merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil implementasi produk kebijakan sosial.

Artinya kebijakan social bukanlah suatu yang kaku melainkan suatu hal yang dimensional jika dan dirujuk pada pencapaian tujuan sosial yang hendak

dicapai, adapun beberapa hal diatas merupakan beberapa hal yang menjadi dimensi dari kebijakan sosial

2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat memberikan landasan atau acuan sebagai kerangka berfikir untuk mengkaji masalah dari sebuah penelitian dan sebagai informasi pendukung dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari hasil penelitian yang masih berhubungan dengan Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai/e-money walaupun mempunyai perbedaan objek penelitian, lokasi, waktu, pembahasan dalam penelitian dapat dijadikan rujukan berfikir yaitu penelitian yang dilakukan oleh ditulis oleh Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2018) dalam Jurnal Tantangan dan Hambatan Implementasi Uang Elektronik di Indonesia. Dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan penilaian terkait implementasi E-money/uang elektronik dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Pengukuran dari hasil implementasi uang elektronik tersebut dilakukan menggunakan metode wawancara dan survei, yang kemudian mendapat kesimpulan yaitu infrastruktur yang memadai, tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap uang elektronik X sudah berjalan dengan baik. Namun, preferensi pengguna untuk memilih produk uang elektronik X, dibandingkan produk uang elektronik lainnya masih cukup baik. Dalam jurnal ini, peneliti juga menjelaskan, faktor penghambat yang dihadapi nasabah uang elektronik X yaitu : keterbatasan merchant, keterbatasan metode akses, keterbatasan channel transaksi, biaya transaksi, kompetitor produk sejenis, serta pengaruh faktor sosial budaya.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini selain pada informan, tempat atau lokasi, waktu, yaitu pada Pelaksanaan E-warong sebagai sarana dalam penerimaan bantuan pangan non tunai. Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada Tantangan dan hambatan implementasi uang elektronik di Indonesia.

Penelitian yang terdahulu oleh Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. (2018), dalam Jurnal Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

kesiapan masyarakat, manfaat dan hambatan penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel populasi. Teknik pengambilan data primer yang digunakan antara lain kuesioner, Forum Group Discussion, Observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi pesentase. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa seluruh masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting sudah dapat dinyatakan siap untuk menggunakan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dan diharapkan program tersebut dapat di implementasikan segera

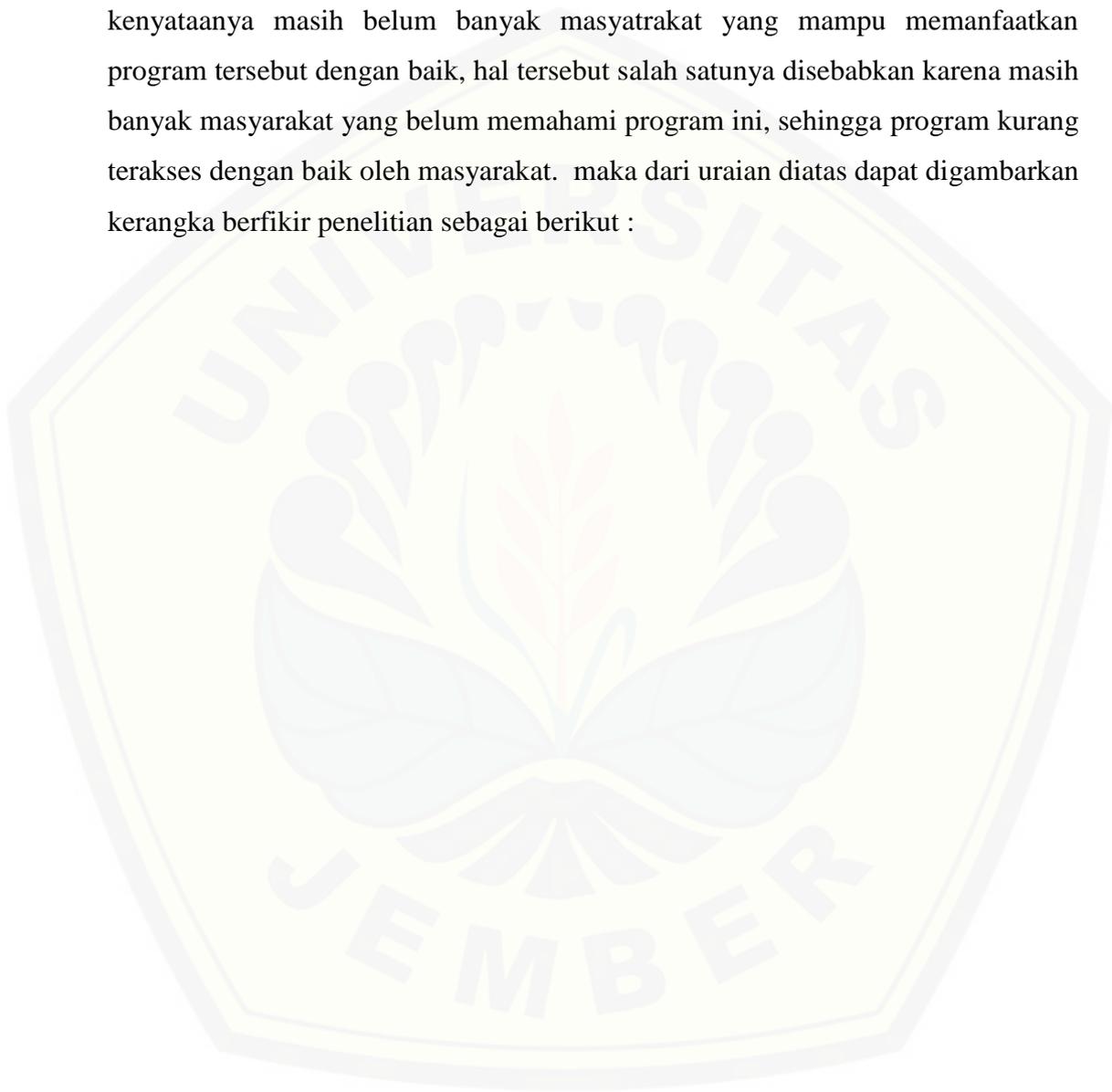
Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini selain pada informan, tempat dan lokasi, waktu yaitu pada teknik analisis data menggunakan 7 tahapan yaitu pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi, penyimpulan data sementara, triangulasi dan penyimpulan data akhir. Untuk keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

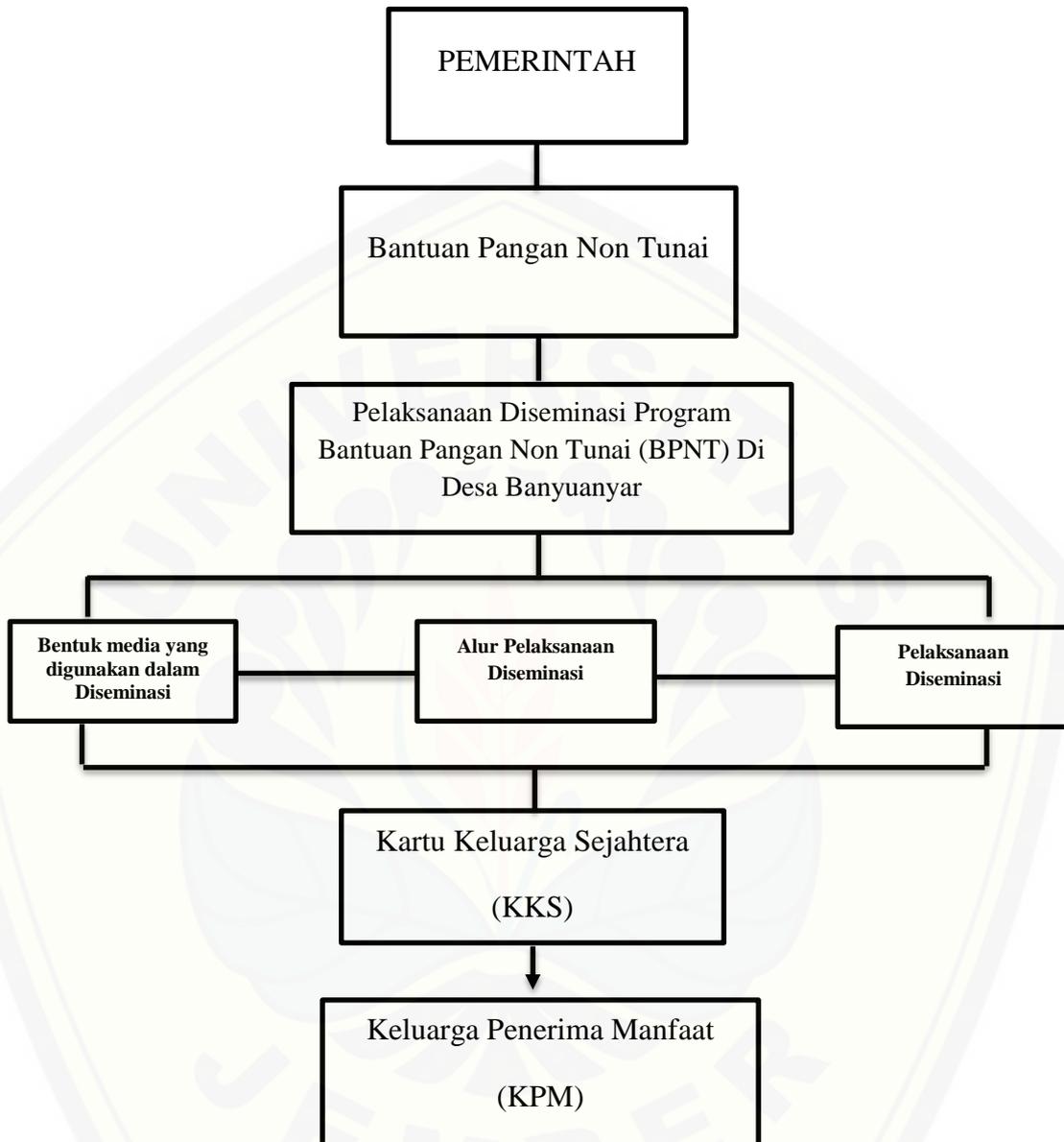
2.8 Kerangka Berfikir

Pada sebuah kerangka berfikir dapat menjadi suatu acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dimana kriteria utama kerangka berfikir ialah dialur pemikiran logis yang membuahkan kesimpulan berupa hipotesis. Kerangka berfikir ini disusun berdasarkan apa yang diteliti, permasalahan, dan tinjauan pustaka serta hasil penelitian yang relevan.

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan diseminasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Banyuanyar. Program ini dilatar belakangi oleh sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program sehingga pada akhirnya pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), diharapkan penyaluran bantuan BPNT akan lebih tepat efektif dan efisien. Namun pada kenyataanya masih belum banyak masyarakat yang mampu memanfaatkan program tersebut dengan baik, hal tersebut salah satunya disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami program ini, sehingga program kurang terakses dengan baik oleh masyarakat. maka dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :



Bagan 2.1: Alur Berpikir Konsep Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti, Agustus 2019

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2012:2). Metode penelitian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran dari objek yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu rancangan, langkah-langkah agar peneliti tidak “tersesat” saat melakukan sebuah penelitian. Sehingga fenomena yang diteliti memiliki hasil yang optimal dengan data-data yang lengkap serta rinci dan terbukti.

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Irwan (2006:52) metode penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif, naturalistik dan berhubungan dengan sifat data yang murni. Dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan peneliti dapat menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh suatu individu, kelompok maupun masyarakat yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan holistik, dengan keadaan yang alamiah (*natural setting*). Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan Usman (2009:78) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri”. Seperti yang dijabarkan oleh Idrus (2009:23-24) bahwa secara sederhana dapat dinyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya”.

Dengan beberapa pertimbangan akan kelebihan dalam penelitian kualitatif seperti penggunaan metode yang alamiah maka, pendekatan kualitatif dianggap cocok oleh penulis untuk diterapkan dalam penelitian ini. Karena dapat memberikan gambaran bagaimana Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwangor.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Sigarimbun dan Efendi Sugiono (2004:13) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dikaitkan dengan mengumpulkan data untuk memberikan gambaran suatu konsep atau gejala, data dilapangan dikumpulkan sejauh dianggap cukup guna memberikan gambaran maksimal yang diinginkan untuk membuktikan dan mengembangkan suatu permasalahan. Peneliti memilih studi deskriptif pada penelitian ini karena untuk menemukan suatu kasus perlu diangkat dengan tujuan untuk memberikan gambaran masalah yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan judul dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwanyar, maka peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena dalam penelitian ini Peneliti berusaha untuk memaparkan ataupun mendeskripsikan penelitian yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang didapat di lapangan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan meringkas suatu kondisi atau situasi yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumentasi, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak diungkapkan dalam bentuk dan angka-angka.

3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Menurut Soebagyo (1997: 35) mengemukakan bahwa: “lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya, penelitian yang baik yaitu lokasi atau obyek penelitian yang sesuai dengan obyek permasalahan.” Lokasi penelitian dalam hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu elemen yang penting untuk diperhatikann karena menyangkut pencarian data-data penting yang diperlukan dalam penelitian. Ketepatan dalam menentukan lokasi penelitian menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Karena berkaitan dengan kebenaran suatu temuan yang digali dan diuji di lapangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemudian melatar belakangi peneliti dalam menentukan lokasi penelitian di Desa Banyuwangi, Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak diujung paling timur Pulau Jawa. Banyuwangi terkenal dengan sebutan *The Sunrise Of Java*, hal ini dikarenakan daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di pulau Jawa. Salah satu keunikan Kabupaten Banyuwangi adalah penduduk yang multikultur, dibentuk oleh 3 elemen masyarakat yaitu Jawa Mataram, Madura, dan Osing. Kabupaten Banyuwangi yang secara geografis terletak pada koordinat $7^{\circ}45' 15''$ – $80^{\circ}43' 2''$ lintang selatan dan $133^{\circ} 38' 10''$ Bujur Timur dan ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas selatan timur Kabupaten Banyuwangi. Selain itu secara administrasi Kabupaten Banyuwangi berbatasan langsung dengan beberapa daerah dan kawasan, adapun batas administrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso
2. Timur : Selat Bali
3. Selatan : Samudera Indonesia
4. Barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso



Gambar 3.1 Balai Desa Banyuwangi, Banyuwangi.

**Table 3.1: Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Desa Banyuwangi 2019**

No	Penduduk	Jumlah
	laki-laki	4368 Jiwa
	Perempuan	4726 Jiwa
	Jumlah total	9094 Jiwa

Sumber data: Profil Desa Banyuwangi 2019

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah seseorang yang berperan penting untuk membantu dan memberikan informasi atau data terkait dengan fenomena sosial yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Moleong (2007: 132):

“Informan adalah orang-dalam latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.”

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Adapun definisi metode ini menurut Sugiyono (2015: 216) *Purposive* adalah penentuan informan yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan pertimbangan kriteria informan itu sendiri. Penentuan informan dieksplorasi dari pihak-pihak yang mengetahui benar tentang fenomena dan data yang diperlukan secara terperinci dan menyeluruh.

Penentuan sample sebagai sumber data atau sebagai informan perlu untuk dipertimbangkan mengenai pemenuhan kriteria, sebagai berikut (Sugiyono, 2015:221):

- Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati;
- Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
- Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi;
- Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;

- e. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan dijadikan semacam guru atau narasumber.

Terkait dengan teknik penentuan informan, terdapat dua tipe informan yang digunakan peneliti yaitu informan pokok (*primary informan*) dan informan tambahan (*secondary informan*).

3.4.1 Informan pokok (*primary informan*)

Informan berfungsi sebagai sumber data yang paling utama dalam penelitian ini. Menurut Sugiono (2013:47) menyatakan bahwa informan pokok atau *primary informan* harus memenuhi lima kriteria yang saling berkaitan, yaitu:

- a. subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktif,
- b. subyek yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti,
- c. subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi,
- d. subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu,
- e. subyek yang sebelumnya masih tergolong dengan penelitian.

Dari kriteria informan pokok di atas, maka yang dapat dijadikan sebagai informan pokok adalah pengelola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengelola yang terdiri dari Wagiyanto sebagai ketua, Efendi sebagai wakil dan Arifatul sebagai sekretaris BPNT di Desa Banyuwangi, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Harapan pemilihan informan pokok tersebut di atas, yaitu mampu memberikan informasi atau data terkait secara aktual dan akurat sesuai kebutuhan peneliti.

3.4.2 Informan tambahan (*secondary informan*)

Selain informan pokok (*primary informan*), dalam sebuah penelitian terdapat pula informan tambahan (*secondary informan*) adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong dan Sutinah, 2005:172). Dalam kaitannya dengan informan sekunder, terdapat kriteria yang menjadi pedoman dalam menentukan informan sekunder yakni informan yang dianggap mengerti tentang fenomena dan masih

berhubungan dengan informan pokok yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bahwa informan sekunder yang dapat digunakan oleh peneliti mengetahui tentang adanya segala sesuatu mengenai fenomena yang sedang dikaji sekalipun fenomena yang dikaji keberadaan informan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini yakni, dari informan tambahan digunakan untuk melengkapi atau hanya sebagai pembanding dalam pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari informan pokok. Kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk mengkategorikan subjek sebagai informan tambahan antara lain :

1. Arbaatun sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Isroiayah sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015: 62). Keberadaan teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tanpa adanya teknik pengumpulan data seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian kualitatif adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengamatan dan pemetaan secara teliti dan sistematis gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti dilapangan. Beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dilakukan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981: 191-193) sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Teknik ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadan sebenarnya.

3. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan ada data yang dijangingnya ada yang keliru atau bias.
5. Teknik observasi memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
6. Dalam beberapa kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan secara terbuka. Observasi terbuka yaitu melakukan observasi sistematis dengan memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu pada subjek yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu memberitahu kepada subjek tentang apa yang akan diteliti dan maksud maksud tujuan peneliti. observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi *Non-participant observer* yang diambil dari teori klasik Herdiansyah (2013:145) yang menyatakan *Non-participant observer* adalah peran dalam observasi yang dipilih dimana dalam melakukan pengamatan, penelitian tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas *observer* atau subjek penelitian. Bentuk tersebut dipilih karena peneliti tidak terlibat langsung didalamnya melainkan sebagai pengamat, selain itu peneliti juga tidak bisa mengikuti secara rutin kegiatan Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwangi. Pelaksanaan Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat jam kerja yaitu pada saat pelaksanaan Diseminasi dilakukan Di Desa Banyuwangi.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) dan terwawancara (*Interviewee*) (dalam Moleong, 2001). Ada berbagai macam cara pembagian dan jenis wawancara sebagai berikut: (a) wawancara pembicaraan informal, (b)

pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka.

Dalam penelitian ini Peneliti disini menggunakan jenis wawancara pembicaraan informal, Wawancara Pembicaraan Informal, jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan terwawancarai adalah hubungan yang biasa saja, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. yang dapat memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan bagi informan namun disini peneliti sejak awal sudah memiliki focus penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuanyar, sehingga seluruh wawancara yang dilakukan tetap terfokus atau diarahkan pada focus penelitian yang telah ditentukan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berupa sumber yang sudah ada. Dokumentasi adalah berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2007:159). Menurut Sugiyono (2015: 82), dokumen mempunyai berbagai macam bentuk diantaranya:

- a. Berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain.
- b. Berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan sketsa
- c. Berbentuk karya seni yang berupa gambar, film, dan lain sebagainya

Berdasarkan pada bentuk-bentuk dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai penguat data penelitian dilapangan pada waktu wawancara. Sedangkan dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa data yang berupa artikel atau surat kabar terkait informasi yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, foto peta

Desa Banyuwangi, arsip terkait Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Banyuwangi. Dalam hal ini metode dokumentasi yang digunakan bertujuan memperoleh data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dari buku-buku peneliti memperkuat data.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) dalam Moleong (2001), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Irawan (2006:76-80) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu

1. Pengumpulan data mentah

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini alat-alat yang digunakan dan dibutuhkan peneliti seperti *tape recorder*, kamera dll.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti menulis apa yang sesuai dengan pembicaraan saat wawancara dilakukan dengan informan.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca data yang telah di transkrip dengan pelan-pelan dan sangat hati-hati, pada tahap ini akan menemukan hal-hal penting perlu dicatat proses berikutnya, serta dari hal-hal penting tersebut mengambil kata kuncinya.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam sesuatu satu besaran

yang kita namakan kategori. Jadi misalkan 65 kata-kata kunci, mungkin akan dirangkum menjadi 12 kategori.

5. Penyimpulan Data

Tahap ini sudah diperoleh untuk mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara, ingat kesimpulan 100% harus berdasarkan data. Jangan campur aduk dengan pemikiran dan penafsiran individu. Jika ingin memberi penafsiran dari pikiran individu sendiri maka tulis pikiran ini pada bagian akhir kesimpulan sementara, yang disebut *observer's comment (OC)*.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara suatu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain.

7. Penyimpulan Akhir

Ada kemungkinan peneliti akan mengambil langkah satu sampai langkah 6 berkali-kali, sebelum mengambil kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kapan kesimpulan akhir diambil? Yakni ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

Dengan demikian dapat menyimpulkan Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa langkah awal dari penelitian ini adalah mencari sumber informasi dan mengumpulkan informasi/data yang ada, penyusunan temuan secara sistematis, dan yang terakhir peneliti memaparkan informasi/data yang sudah disusun secara sistematis kepada orang lain.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Pengujian kevalitan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan standar kredibilitas dengan cara triangulasi.

Menurut Moleong (2009) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguna yaitu:

- 1) Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan hasil tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- 2) Triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3) Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981:307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dalam hal ini jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan dengan cara memadukan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan informasi atau data dari suatu informan, peneliti melakukan pengecekan kepada informan lainnya sebagai pendamping. Sehingga dari sumber yang berbeda, kemudian dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda, serta mana yang spesifik agar keabsahan data tersebut benar-benar terjamin.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan diseminasi program bantuan pangan non tunai berjalan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh Kementerian sosial dan Bansos pangan pusat yang tertuang dalam pedoman umum program bantuan pangan non tunai. Akan tetapi untuk informasi tentang adanya pelaksanaan diseminasi yang dilakukan oleh pihak E-warong kepada masyarakat penerima KPM/BPNT perlu adanya perhatian lebih lanjut karena berbagai faktor yang menjadi hambatan, berupa ketidaktahuan masyarakat bahwa akan dilakukannya kegiatan diseminasi pada saat itu. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

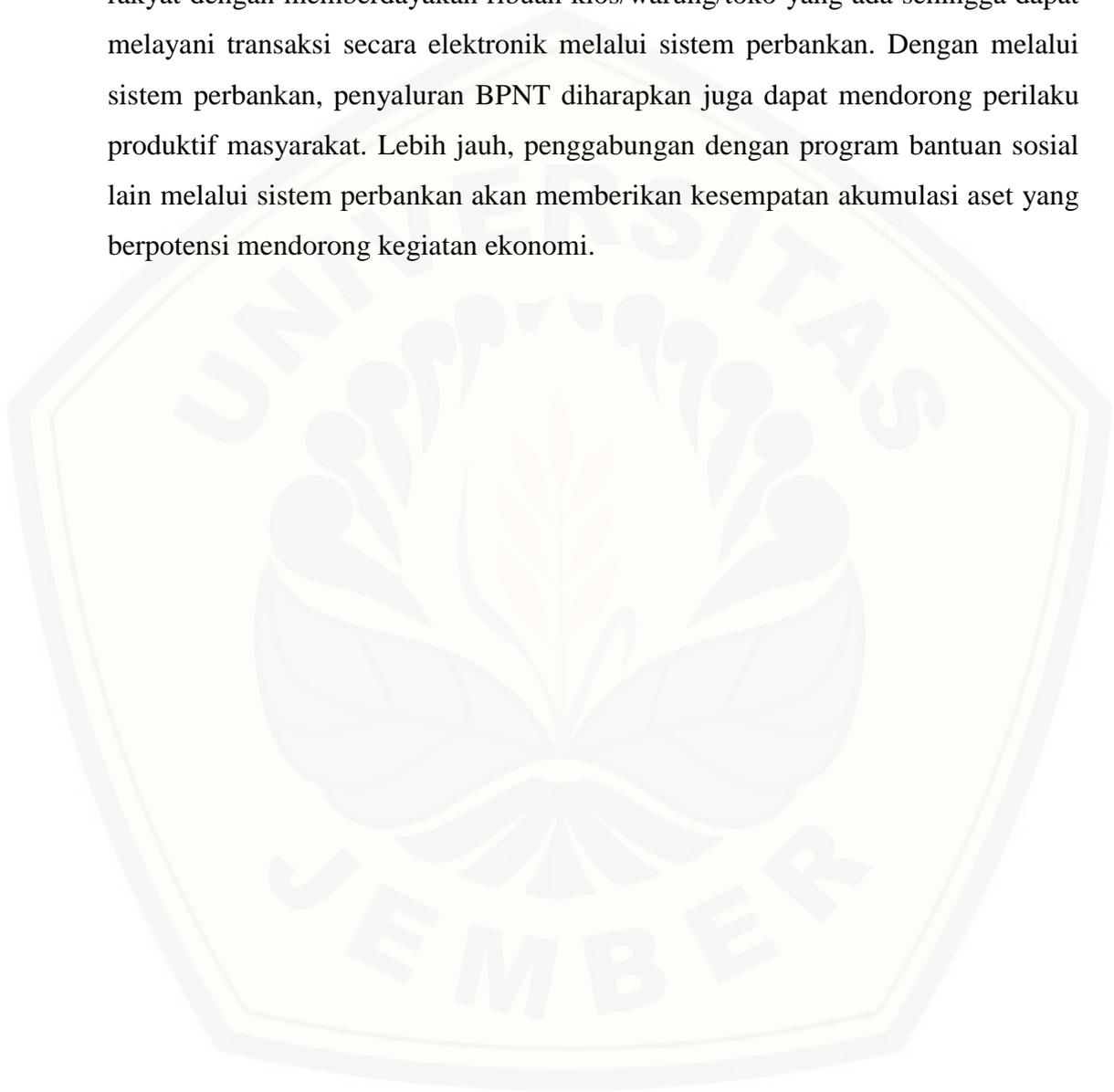
- a. Pelaksanaan diseminasi dilakukan pada saat sebelum pembagian sembako.
- b. Pelaksanaan diseminasi dilakukan di Balaidesa Banyuwangi, Materi yang disampaikan secara lengkap terutama menyangkut apa tujuan dan manfaat program bantuan pangan non tunai, yang menyampaikan materi pada saat pelaksanaan diseminasi program bantuan pangan non tunai adalah kepala Desa Banyuwangi dan didampingi pelaksana diseminasi program bantuan pangan non tunai.
- c. Masyarakat sangat antusias dengan adanya pelaksanaan diseminasi ini, sehingga banyak masyarakat yang berdatangan untuk mengikuti pelaksanaan diseminasi tersebut.
- d. Sasaran dari pelaksanaan diseminasi adalah KPM (keluarga penerima manfaat)

5.2 Saran

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui program Raskin/rastra, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui

Program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.

Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anton, Moeliono. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Bintoro Tjokromidjojo. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung.

Bodnar, George H and William S Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit ANDI, Yogyakarta

Davis, Gordon B, 2018. *Kerangka Dasar : Sistem Informasi Manajemen, Bagian I Pengantar*. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo.

Denzin, N. K. 1978. *Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.

Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Guba, E.G & Lincoln Y.S, 1981. *Effektif Evaluation. Improving The Usefulness Of Evaluations Result Through Responsive And Naturalistic Approaches*. Jasey-Bass Inc. Publisher

Husaini, Usman.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Idrus, M. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

P. Sondang Siagian. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Patton, Michael Quinn. 1985. *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills : Sage Publication.

Rosady, Ruslan. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta:

Santoso Satroepoetro. 1982. *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

Sutanta. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta :EKONISIA

The Liang Gie, dan sutarto. 1997. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana.

W,J,S, Poerwaarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

PENELITIAN :

Abidin, M. S., & Anwar, M. K. 2015. *Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Anggraeni, F. N., & Prasetyo, P. E. 2017. *Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan*. Economics Development Analysis Journal, 6(1), 42-49.

Ramdani, D. D., Gandana, R. S., Setyamarta, N., & Aulina, L. 2015. *Triple C (Centralize And Comprehensive Concept) Sebagai Usaha Strategis Penerapan E-Money Indonesia*. Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis.

Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. 2017. *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus PT XYZ*. Jurnal Sistem Informasi, 13(1), 38-48.

INTERNET :

http://rri.co.id/jember/post/berita/532503/daerah/banyuwangi_mulai_salurkan_bpnt_kepada_101626_warga_kurang_mampu.html.

[https://www.google.com/search?ei=fFNUxCL4Ip_Vz7sPooyTkAs&q=www.kemosos.go.id&oq=www.kemosos.go.id&gs_l=psyab.3..012j0i10i30j0i30i7.2189.2189..3723...0.0..0.87.87.1.....0....2j1..gswiz.1Mk_bfzgb94&ved=0ahUKEwjCpp6Ly7TkAhWf6nMBHSLGBLIQ4dUDCAo&uact=5. \(www.kemosos.go.id\)](https://www.google.com/search?ei=fFNUxCL4Ip_Vz7sPooyTkAs&q=www.kemosos.go.id&oq=www.kemosos.go.id&gs_l=psyab.3..012j0i10i30j0i30i7.2189.2189..3723...0.0..0.87.87.1.....0....2j1..gswiz.1Mk_bfzgb94&ved=0ahUKEwjCpp6Ly7TkAhWf6nMBHSLGBLIQ4dUDCAo&uact=5. (www.kemosos.go.id))

[https://www.google.com/search?q=m.antaranews.com&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjatI-mo7bkAhXLb30KHVYJDzUQBQguKAA&biw=1366&bih=657. \(www.m.antaranews.com\)](https://www.google.com/search?q=m.antaranews.com&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjatI-mo7bkAhXLb30KHVYJDzUQBQguKAA&biw=1366&bih=657. (www.m.antaranews.com))

<http://dokumen.tips/documents/buku-sakupekerja-sosialdocx.html>

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

1.1 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN POKOK

**PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR**

(Studi Deskriptif Pada Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)

Tanggal :

Lokasi :

1. Identitas Informan Pokok

- a. Nama Lengkap :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

2. Terkait dengan Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Tolong diceritakan bagaimana penentuan tujuan program bantuan ini ?
- b. Tolong diceritakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami tujuan program tersebut ?
- c. Siapakah yang pada waktu itu menyampaikan tentang tujuan program ini ?
- d. Tolong jelaskan apakah bapak dan ibu juga mendapatkan buku-buku yang harus dipelajari ?
- e. Selain mengikuti pengarahannya, apakah bapak dan ibu juga membahas bersama tujuan-tujuan tersebut ?
- f. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diseminasi di Desa Banyuanyar ?
- g. Apa kendala selama pelaksanaan diseminasi ini ?
- h. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?
- i. Siapa saja sasaran dari pelaksanaan diseminasi program ini ?
- j. dilakukannya di mana pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?

1.2 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN TAMBAHAN

PELAKSANAAN DISEMINASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BANYUANYAR

(Studi Deskriptif Pada Masyarakat Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)

Tanggal :

Lokasi :

1. Identitas Informan Tambahan

- a. Nama Lengkap :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

2. Terkait dengan Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Tolong diceritakan tentang pemahaman bapak/ibu penerima manfaat tentang tujuan program bantuan pangan non tunai ?
- b. Tolong dijelaskan tentang mekanisme pengambilan bantuan tersebut ?
- c. Tolong jelaskan persyaratan penerima bantuan tersebut ?
- d. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mendapat penjelasan tentang bantuan yang akan diterima ?
- e. Tolong dijelaskan alasan-alasan bapak/ibu sampai merasa senang ?
- f. Tolong diceritakan, kepada siapa sajakah bapak/ibu menceritakan rasa senang setelah mendapatkan penjelasan tersebut ?
- g. Bagaimana sikap bapak/ibu terkait dengan proses atau mekanisme penyaluran bantuan yang mempergunakan kartu ATM dan hanya dapat dipergunakan untuk mengambil bantuan ?
- h. bagaimana anda bisa tau kalau anda mendapatkan program bantuan pangan non tunai (BPNT)?
- i. Tolong dijelaskan tentang pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola program ?
- j. Adakah usulan-usulan dari bapak/ibu terhadap pelaksanaan diseminasi program bantuan ini ?

LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA

NO	INFORMAN POKOK	WAKTU	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Informan wagiyanto merupakan ketua bumdesa banyuanyar serta menjabat sebagai ketua dari pelaksana program BPNT didesa banyuanyar. Informan juga menjabat sebagai rt setempat, informan saat ini berusia 45 tahun. Beliau pendidikan terakhir adalah SMA.</p>	7 Juli 2020	<p>1. Tolong diceritakan bagaimana penentuan tujuan program bantuan ini ?</p> <p>2. Tolong diceritakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami tujuan program tersebut ?</p> <p>3. Siapakah yang pada waktu itu menyampaikan tentang tujuan program ini ?</p> <p>4. Tolong jelaskan apakah bapak dan ibu juga mendapatkan buku-buku yang harus di pelajari ?</p> <p>5. Selain mengikuti pengarahan, apakah bapak dan ibu juga membahas bersama tujuan-tujuan tersebut ?</p>	<p>1. “Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui program ini di harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM”.</p> <p>2. “upaya yang kita lakukan kepada masyarakat penerima bantuan dilakukan dengan memberi penjelasan atau arahan langsung (perkumpulan) supaya masyarakat dapat memahami dan mengerti tujuan dari program tersebut”.</p> <p>3.”yang menyampaikan pada waktu itu kepala desa yang di dampingi oleh anggota pelaksana BPNT”</p> <p>4. “kalo buku-buku kita tidak ada, kita hanya punya pedoman yang saya dapat dari pendamping pelaksana BPNT”</p> <p>5. “iya mbak, kita membahas bersama tujuan-tujuan dari program bantuan pangan non tunai ini bersama masyarakat penerima bantuan supaya masyarakat dapat memahami tujuan dari program tersebut dan supaya tidak di salah gunakan”</p>

			<p>6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diseminasi di desa banyuanyar ?</p> <p>7. Apa kendala selama pelaksanaan diseminasi ini ?</p> <p>8. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p> <p>9. Siapa saja sasaran dari pelaksanaan diseminasi program ini ?</p> <p>10. Dilakukan dimana pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p>	<p>6. “kita terlebih dahulu berkoordinasi dengan RT setempat supaya memberikan informasi kepada KPM mengenai jadwal dan tempat yang telah di tetapkan oleh anggota pelaksana BPNT dan pelaksanaan diseminasi ini dilakukan sebelum pembagian sembako”.</p> <p>7. “kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan diseminasi ini ialah pertama mengingat rentan usia penerima manfaat, kedua keterbatasan komunikasi (terjadinya mis komunikasi antara RT dan Penerima manfaat)”.</p> <p>8. “sebagian besar masyarakat sangat antusias terhadap pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan ini, tidak luput juga ada sebagian kecil dari masyarakat penerima manfaat yang kurang antusias di karenakan faktor keterbatasan kominikasi”.</p> <p>9. “sasarannya iya itu tadi dek, warga penerima manfaat / KPM”.</p> <p>10. “biasanya pelaksanaan diseminasi kita lakukan di balai desa, namun untuk saat ini kita laksanakan di setiap dusun”.</p>
--	--	--	---	--

<p>2.</p>	<p>Informan kedua adalah efendi fathor rohman. Beliau menjabat sebagai ketua e-warong serta anggota dari pelaksana program BPNT didesa banyuanyar. Informan saat ini berusia 26 tahun. Pendidikan terakhir adalah D3 jurusan (Peternakan)</p>	<p>8 Juli 2020</p>	<p>1. Tolong diceritakan bagaimana penentuan tujuan program bantuan ini ?</p> <p>2. Tolong diceritakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami tujuan program tersebut ?</p> <p>3. Siapakah yang pada waktu itu menyampaikan tentang tujuan program ini ?</p> <p>4. Tolong jelaskan apakah bapak dan ibu juga mendapatkan buku-buku yang harus di pelajari ?</p> <p>5. Selain mengikuti pengarahan, apakah bapak dan ibu juga membahas bersama tujuan-tujuan tersebut ?</p>	<p>1.” seperti yang ada dalam link panduan bpnt, program BPNT sendiri tujuannya diharapkan bisa membantu mengurangi beban pengeluaran KPM dan memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM itu sendiri”.</p> <p>2. “biasanya kita adakan pertemuan dan memberi penjelasan kepada penerima manfaat supaya memahami tujuan dari program bantuan pangan non tunai itu sendiri”.</p> <p>3. “kalau untuk petugas yang menyampaikan dalam rangka tersebut yaitu kita sebagai anggota pelaksana dan juga kepala desa”.</p> <p>4. “saya pribadi kalau buku gak punya mbak tapi kalau link ada dan biasanya juga ada rapat rutin”.</p> <p>5. “kita memang biasa membahas bersama tentang tujuan-tujuan dari program bantuan pangan non tunai ini agar keluarga penerima manfaat memahami tujuan dari program bantuan itu sendiri”.</p>
-----------	---	--------------------	---	---

			<p>6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diseminasi di desa banyuanyar ?</p> <p>7. Apa kendala selama pelaksanaan diseminasi ini ?</p> <p>8. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p> <p>9. Siapa saja sasaran dari pelaksanaan diseminasi program ini ?</p> <p>10. Dilakukan dimana pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p>	<p>6. “biasanya kita memberi tahu rt terlebih dahulu agar rt menyampaikan kepada warga tentang jadwal dan informasi yang akan disampaikan”.</p> <p>7. “mungkin kendala utamanya yaitu informasi yang kurang dipahami oleh keluargapenerima manfaat itu sendiri karena sebagian dari kpm tidak dapat baca tulis dan sudah lanjut usia”.</p> <p>8. “respon dari masyarakat sangat positif dan masyarakat merasa senang dengan adanya diseminasi program bantuan ini karena masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang adanya program bantuan pangan no tunai ini”.</p> <p>9. “sasaran dari pelaksanaan program ini adalah masyarakat penerima manfaat / KPM”.</p> <p>10. “biasanya pelaksanaan diseminasi ini dilakukan di balai desa supaya tidak ada pihak yang di beratkan masalah tempat”.</p>
--	--	--	---	--

<p>3.</p>	<p>Informan ketiga adalah arifatul ainul izza beliau menjabat sebagai sekretaris bumdesa di desa banyuanyar serta sebagai anggota pelaksana program BPNT di desa banyuanyar. Saat ini berusia 26 tahun. Pendidikan terakhir adalah S1 jurusan (Ekonomi).</p>	<p>9 Juli 2020</p>	<p>1. Tolong diceritakan bagaimana penentuan tujuan program bantuan ini ?</p> <p>2. Tolong diceritakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami tujuan program tersebut ?</p> <p>3. Siapakah yang pada waktu itu menyampaikan tentang tujuan program ini ?</p> <p>4. Tolong jelaskan apakah bapak dan ibu juga mendapatkan buku-buku yang harus di pelajari ?</p> <p>5. Selain mengikuti pengarahannya, apakah bapak dan ibu juga membahas bersama tujuan-tujuan tersebut ?</p>	<p>1. “penentuan tujuan program bantuan ini kita sesuaikan dengan panduan yang sudah tertera di website pemerintahan supaya sesuai dengan prosedur yang sudah diberlakukan yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan”.</p> <p>2. “kita adakan pertemuan dengan masyarakat dan kita upayakan menjelaskan se detail-detailnya supaya kita dapat memahami bersama maksud dan tujuan adanya program tersebut”.</p> <p>3. “yang menyampaikan maksud dan tujuan program ini pada waktu itu ialah kepala desa sendiri yang di dampingi oleh pelaksana program bantuan pangan non tunai”.</p> <p>4. “kalo buku sepertinya tidak ada cuma kita dapat memahami dan belajar di website yang telah disebar oleh pemerintah setempat sebagai media untuk mempelajari tentang program bantuan ini”.</p> <p>5. “iya mbak , kita membahas bersama maksud dan tujuan-tujuan adanya program ini supaya sesuai dengan prosedur yang telah di berlakukan”.</p>
-----------	--	--------------------	--	--

			<p>6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diseminasi di desa banyuanyar ?</p> <p>7. Apa kendala selama pelaksanaan diseminasi ini ?</p> <p>8. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p> <p>9. Siapa saja sasaran dari pelaksanaan diseminasi program ini ?</p> <p>10. Dilakukan dimana pelaksanaan diseminasi tentang program bantuan pangan non tunai ini ?</p>	<p>6. “pertama kita memberi tahu kepada setiap RT di desa banyuanyar setelah itu masing-masing RT menyampaikan kepada masyarakat penerima bantuan tentang jadwal dan tempat yang telah kita sediakan”.</p> <p>7. “kendalanya ada sebagian masyarakat penerima manfaat yang mungkin bisa dikatakan sudah lanjut usia ya mbak jadi untuk memahami apa yang kita sampaikan masih perlu disampaikan berulang sehingga dapat di mengerti dan di pahami dengan jelas”.</p> <p>8. “respon dari masyarakat bisa di bilang positif dan masyarakat merasa senang ya mbak karena dengan adanya diseminasi tentang program bantuan ini masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan program tersebut”.</p> <p>9. “sasaran dari pelaksanaan program ini adalah masyarakat penerima manfaat/KPM mbak”.</p> <p>10. “pelaksanaan diseminasi ini kita lakukan di balai desa mengingat tempat yang dapat di jangkau oleh masyarakat penerima manfaat/KPM”.</p>
--	--	--	---	---

NO	INFORMAN TAMBAHAN	WAKTU	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Informan Isroiya merupakan KPM dari dusun curah leduk yang sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga beliau memiliki 2 orang anak, saat ini beliau berusia 50 tahun, pendidikan terakhir tamat smp.</p>	11 Juli 2020	<p>1. Tolong diceritakan tentang pemahaman bapak/ibu penerima manfaat tentang tujuan program bantuan pangan non tunai ?</p> <p>2. Tolong dijelaskan tentang mekanisme pengambilan bantuan tersebut ?</p> <p>3. Tolong jelaskan persyaratan penerima bantuan tersebut ?</p> <p>4. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mendapat penjelasan tentang bantuan yang akan diterima ?</p>	<p>1. “sataonah engkok dek kan pernah bede perkumpulan. Nah, petugassa ajelassagi tojuenah deri bantuan riah gebey abento ngorange pengeloaranna tang keluarga, mon en la enna ruah engkoq paham nik sekunik.</p> <p>“setau saya dek, pernah ada perkumpulan. Nah, petugasnya menjelaskan tujuan dari bantuan ini buat membantu mengurangi pengeluaran keluarga saya. Kalo yang lainnya itu saya hanya paham sedikit”</p> <p>2. “ mon biasana engkoq ben bulen ngalak neng balai desa ngibe kartu atm ah degik depak balaidesa kartuna egesek bik petugassa, biasana olle beres jukok ajem, tahu tempe bik telur”</p> <p>“kalo biasanya saya setiap bulan ngambil di balai desa bawa kartu ATM sesampainya di balai desa, kartunya di gesek oleh petugasnya, biasanya dapat beras, daging ayam, tahu tempe dan telur”.</p> <p>3. “mon engkoq sabben se adarta na epentaen foto copy kk bik ktp pas e data ruah”</p> <p>“kalau saya dulu didata sama rta nya dimintai foto copy kk dan ktp waktu di data itu”</p> <p>4. “seneng onggu dek, engkoq tak nyangka mon olleah bantuan soalla la abit se edata caen engkoq mik tak olliah polana se laen la olle”</p>

			<p>5. Tolong dijelaskan alasan-alasan bapak/ibu sampai merasa senang ?</p> <p>6. Tolong diceritakan, kepada siapa sajakah bapak/ibu menceritakan rasa senang setelah mendapatkan penjelasan tersebut ?</p> <p>7. Bagaimana sikap bapak/ibu terkait dengan proses atau mekanisme penyaluran bantuan yang menggunakan kartu ATM dan hanya dapat dipergunakan untuk mengambil bantuan ?</p> <p>8. Bagaimana anda bisa tau kalau anda mendapatkan program bantuan pangan non tunai (BPNT)?</p>	<p>“senang sekali dek, tidak saya sangka kalaudapat bantuan karena sudah lama yang didata, saya pikir saya tidak dapat bantuan soalnya yang lain sudah dapat”</p> <p>5. “ye kan abantu ka tang keluarga dek, ben bulen olle engak ruah la alhmdulillah engkoq”</p> <p>“ya karena membantu keluarga saya dek, setiap bulan dapat bantuan seperti itu itu saja sudah sangat bersyukur saya”</p> <p>6. “engkoq acereta ka oreng bengko bik ka tatangge pole dek”</p> <p>“saya cerita ke orang rumah dan ke tetangga juga dek”.</p> <p>7. “aslina nyamanan dekiyeh dek, soalla kan kartuna eteguk bik dibik ebeng deddi tak kera esala guna agin bik oreng laen”</p> <p>“sebenarnya lebih enak seperti ini dek, karena kan kartunya dipegang sendiri-sendiri jadi gak mungkin disalah gunakan sama orang lain”.</p> <p>8. “engkoq tao deri petugassa eyentaren ka bengko abele mon engkoq olle bantuan riah caen dek”</p> <p>“saya tau dari petugasnya mereka kerumah bilang kalau saya dapat bantuan katanya dek”</p>
--	--	--	--	--

			<p>9. Tolong dijelaskan tentang pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola program ?</p> <p>10. Adakah usulan-usulan dari bapak/ibu terhadap pelaksanaan diseminasi program bantuan ini ?</p>	<p>9. “engkoq korang paham mon se bertanggung jawab sapa dek biasa jet bedeh petugasah ben bulen se biasa nyaluragin bantuan riah”</p> <p>“saya kurang paham siapa yang bertanggung jawab dek, biasanya memang ada petugasnya setiap bulan yang biasa menyalurkan bantuan ini”</p> <p>10. “ mon caen engkoq se paleng penting ruah komunikasina dek soalla bedeh oreng se tak tao kan benyak se la tua ruah”</p> <p>“kalau menurut saya yang palinh penting itu komunikasi dek karena ada masyarakat yang tidak tau informasi dari pelaksanaan desiminasi program ini karena sebagian besar sudah lanjut usia”</p> <p>1. “engak se esampaiaghi kepala desa bekto bedeh rapat neng e balai desa mun maksot ben tojjuen program riah adalah gentena rastra, eyarep tepat sasaran ben bisa abento beban pengeluaran se narema bantuan”</p> <p>“seperti yang sudah disampaikan kepala desa waktu diadakannya rapat dibalai desa kalau maksud dan tujuan program ini adalah program pengganti rastra, diharapkan tepat sasaran dan dapat membantu beban pengeluaran penerima bantuan”.</p>
<p>2.</p>	<p>Informan kedua yaitu Arbaatun, beliau merupakan KPM dari dusun curah leduk, sehari hari beliau adalah ibu rumah tangga. Beliau memiliki 1 orang anak, saat ini beliau berusia 40 tahun, pendidikan terakhir tamat sma.</p>	<p>12 Juli 2020</p>	<p>1. Tolong diceritakan tentang pemahaman bapak/ibuk penerima manfaat tentang tujuan program bantuan pangan non tunai ?</p>	

			<p>2. Tolong dijelaskan tentang mekanisme pengambilan bantuan tersebut ?</p> <p>3. Tolong jelaskan persyaratan penerima bantuan tersebut ?</p> <p>4. Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mendapat penjelasan tentang bantuan yang akan di terima ?</p> <p>5. Tolong dijelaskan alasan-alasan bapak/ibu sampai merasa senang ?</p>	<p>2. “gebey ngalak ben bulen engkok deteng ke balai desa, dek-adek kartuna egesek ben deggik eporop bik sembako se la esadiegin”</p> <p>“untuk pengambilan setiap bulannya saya datang kebalaidesa, pertama dilakukan penggesekan kartu dan nanti ditukarkan dengan sembako yang sudah disediakan”.</p> <p>3. “massena sabben engkok esoro nyerraagin foto copy kk ben ktp, tape se a data pak RT kaadek”</p> <p>“sepertinya saya dulu disuruh menyerahkan foto copy kk dan ktp, namun yang mendata adalah rt terlebih dahulu”.</p> <p>4. “alhamdulillah a sokkor sakale polana mun caen engkok pribadi program ria sangat abento kaparloan keluaragana engkok dek”.</p> <p>“alhamdulillah bersyukur sekali karena menurut saya pribadi program ini sangat membantu kebutuhan keluarga saya dek”.</p> <p>5.”polana sebelumma engkok gitak pernah olle bantuan, makana ruah engkok merasa asokkor onguh olle narema bentoan riah”.</p> <p>“karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan bantuan, oleh karena itu saya merasa sangat bersyukur dapat menerima bantuan tersebut”.</p>
--	--	--	--	--

			<p>6. Tolong diceritakan, kepada siapa sajakah bapak/ibu menceritakan rasa senang setelah mendapatkan penjelasan tersebut ?</p> <p>7. Bagaimana sikap bapak/ibu terkait dengan proses atau mekanisme penyaluran bantuan yang mempergunakan kartu ATM dan hanya dapat dipergunakan untuk mengambil bantuan ?</p> <p>8. Bagaimana anda bisa tau kalau anda mendapatkan program bantuan pangan non tunai (BPNT)?</p> <p>9. Tolong dijelaskan tentang pihak yang bertanggung jawab sebagai pengelola program ?</p>	<p>6.” Dek-adeknah engkok tau mun olle bentoan engkok acareta ka lakenah engkok dek, katepa’an kiah bedeh anakna engkok edissak”.</p> <p>“pertama saya tau kalau mendapatkan bantuan saya bercerita kepada suami saya dek, kebetulan juga ada anak saya disana”.</p> <p>7. “lebih efisien polanah bentoan se kita taremah lebih aman deri program rastra polana pihak lain sulit gebey menyalahgunakan bentoan riah dek”.</p> <p>“lebih efisien karena bantuan yang kita dapat lebih aman dari program rastra karena pihak lain sulit untuk menyalahgunakan bantuan tersebut dek”.</p> <p>8.” Engkok tao deri petugassa se deteng ka romah ben aberrik taoh mun engkok olle bentoan bpnt”.</p> <p>“saya mengetahui dari petugas yang datang kerumah dan memberi tau kalau saya mendapatkan bantuan bpnt”.</p> <p>9.”mun pelaksanaannah engkok tao tape mun se deddi penanggung jawab engkok kurang paham dek”.</p> <p>“kalau pelaksanaannya saya tau tapi kalau yang dijadikan penanggung jawab saya kurang paham dek”.</p>
--	--	--	--	---

			<p>10. Adakah usulan-usulan dari bapak/ibu terhadap pelaksanaan diseminasi program bantuan ini?</p>	<p>10. “mun usulan deri engkok nyampeagi informasinah lebih detail ben lebih jelas sopaje se narema manfaat bisa lebih ngarte ben memahami kalaben apa se esampaiagi bento pelaksanaan diseminasi proram riah dek”.</p> <p>“kalau usulan dari saya penyampaian informasinya lebih detail dan lebih jelas supaya penerima manfaat bisa lebih mengerti dan memahami tentang apa yang disampaikan pada saat pelaksanaan diseminasi program tersebut dek”.</p>
--	--	--	---	--

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI





LAMPIRAN 4 Surat Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 5309 /UN25.3.1/LT/2019
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

23 November 2019

Yth. Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyuwangi
Di
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4897/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Anisatul Jannah
NIM : 130910301011
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Kalimantan 14 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Banyuanyar"
Lokasi Penelitian : Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru-Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : 2 Bulan (2 Januari-28 Februari 2020)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


a.n. Ketua
Sekretaris
Dr. Subanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.

LAMPIRAN 5 Surat Rekomendasi Penelitian dari Desa Banyuwangi

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**
KECAMATAN KALIBARU
KANTOR DESA BANYUANYAR
Jl. Isyak Soejono No. 26 Banyuwangi, Kalibaru, Banyuwangi 68467

SURAT REKOMENDASI
No. 145/ 16 /429.521.05/2020

Sehubungan dengan adanya surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Banyuwangi maka Kami rekomendasikan dan memberikan Ijin untuk mengadakan Penelitian di Desa Banyuwangi atas nama :

Nama	: ANISATUL JANNAH
Nim	: 130910301011
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat / Tgl Lahir	: Banyuwangi, 14 Juli 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Maha siswi
Alamat	: Dusun Curahleduk Rt 04 Rw 03 Desa Banyuwangi kecamatan Kalibaru

Demikian Rekomendasi ini dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Banyuwangi, 31 Januari 2020
Kepala Desa Banyuwangi


H. SUPARDI